

## Jokowi: Pemerintah Tak Suka Impor Beras, Tapi ...

JAKARTA (IM) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pemerintah pada dasarnya tak suka mengimpor beras. Ia menyebut, selama ini impor beras terpaksa dilakukan karena adanya hambatan produksi akibat pandemi Covid-19.

“Tentu saja kita juga ingin swasembada. Pemerintah sebetulnya tidak senang, tidak suka yang namanya impor beras,” kata Jokowi saat meninjau panen di Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4).

“Tapi karena hitung-hitungan, banyak yang kena banjir, pandemi, kadang memang hitung-hitungan kalkulasi, waduh ini kurang sehingga perlu tambahan untuk cadangan tapi kemarin sudah kita putuskan bahwa sampe Juni tidak ada impor,”

ujarnya.

Kepala Negara mengungkapkan bahwa pemerintah berencana tidak akan impor beras hingga akhir 2021 mendatang. Asalkan, kata dia, produksi padi di Tanah Air bagus.

“Insy Allah nanti sampai akhir tahun, kalo kita tahan, produksinya bagus berqtri juga tidak akan impor,” tukasnya.

Jokowi bertolak ke Indramayu, Jawa Barat, Rabu (21/4) pagi dengan menempuh perjalanan darat dari Istana Kepresidenan Bogor.

Berdasarkan rilis Biro Pers Sekretariat Presiden, Jokowi berangkat sekitar pukul 07.00 WIB menuju Desa Wanasari, Kecamatan Bangodua, Indramayu. Kemudian, pada pukul 10.00 WIB, Jokowi meninjau dan berdialog dengan para petani setempat. ● han

## Kejari Sudah Panggil 16 Orang Terkait Dugaan Korupsi di Dinas Damkar Depok

DEPOK (IM) - Kepala Seksi Intelijen Kejaksanaan Negeri (Kejari) Depok Herlangga Wisnu Mardianto menyebutkan, sudah 16 orang yang dipanggil Kejari terkait dengan dugaan kasus korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

Pemanggilan para pihak itu masih dalam tahapan pengumpulan data dan keterangan, bukan penyelidikan maupun penyidikan.

“Semua total dari pihak-pihak yang kami anggap mengetahui permasalahan. Jadi tidak hanya (pegawai) di Damkar, pokoknya siapa saja yang kami anggap mengetahui permasalahan. Bagaimana bisa kami melakukan pemanggilan, ya, otomatis dari keterangan-keterangan orang yang sebelumnya dipanggil,” jelas Herlangga kepada wartawan, Rabu (21/4).

Dari 16 orang itu, 4 di antaranya merupakan eks pejabat di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

“Dua mantan sekretaris dinas, dua mantan pejabat

pengadaan,” ujar Herlangga. Herlangga belum bersedia membocorkan materi-materi pemanggilan serta keterangan apa saja yang telah mereka peroleh dari 16 orang itu.

“Yang pasti kami semakin banyak mendapatkan data berupa dokumen. Karena (kasus) ini merupakan pengadaan barang dan jasa, otomatis berhubungan dengan dokumen,” ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya masih memiliki waktu sekitar 3 pekan untuk menghimpun sebanyak mungkin data dan keterangan terkait dugaan korupsi di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Depok.

Pemanggilan kepala dinas maupun wali kota Depok masih menunggu perkembangan selanjutnya. “Hingga saat ini masih kami merasa belum perlu, namun apabila nanti kami merasa memerlukan keterangan dari yang bersangkutan, kami akan melakukan pemanggilan,” kata Herlangga. ● han



### PEMERIKSAAN NURDIN ABDULLAH

Tersangka selaku Gubernur nonaktif Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah (kanan) tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (21/4). Nurdin menjalani pemeriksaan lanjutan kasus dugaan suap perizinan dan pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel Tahun Anggaran 2020-2021.

## Saksi Sebut Hasil Tes Antigen Habib Rizieq Reaktif Covid-19

JAKARTA (IM) - Salah satu saksi dalam persidangan Habi Rizieq Shihab, dokter relawan Mer-C, Hadiki Habib, mengungkapkan bahwa hasil tes usap antigen Rizieq Shihab menunjukkan reaktif Covid-19.

Dia mengatakan, dirinya mendapatkan perintah dari Mer-C untuk melakukan tes cepat antigen kepada Rizieq Shihab pada 20 November 2020.

“Di kediaman beliau di Sentul. Sore hari ba'da Ashar,” kata dr. Hadiki Habib dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu (21/4).

Dia melanjutkan bahwa setelah hasil tes cepat antigen diketahui, ia kemudian menyampaikan hal tersebut kepada Rizieq Shihab.

Menurut pengakuan Hadiki, terdakwa Rizieq Shihab mengungkapkan kesediaannya untuk mengikuti prosedur protokol kesehatan yang ada terkait hasil reaktif Covid-19 tersebut.

“Saya memberikan edukasi dan pihak terdakwa akan mengikuti aturan protokol yang ada. Kita membangun kesepakatan untuk

melakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut,” ujar Hadiki.

Selanjutnya, terdakwa Rizieq Shihab dibawa ke RS UMMI sebagai rujukan Covid-19 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menurut Hadiki, pemilihan RS UMMI karena lokasinya yang tak jauh dari kediaman terdakwa Rizieq Shihab di Sentul.

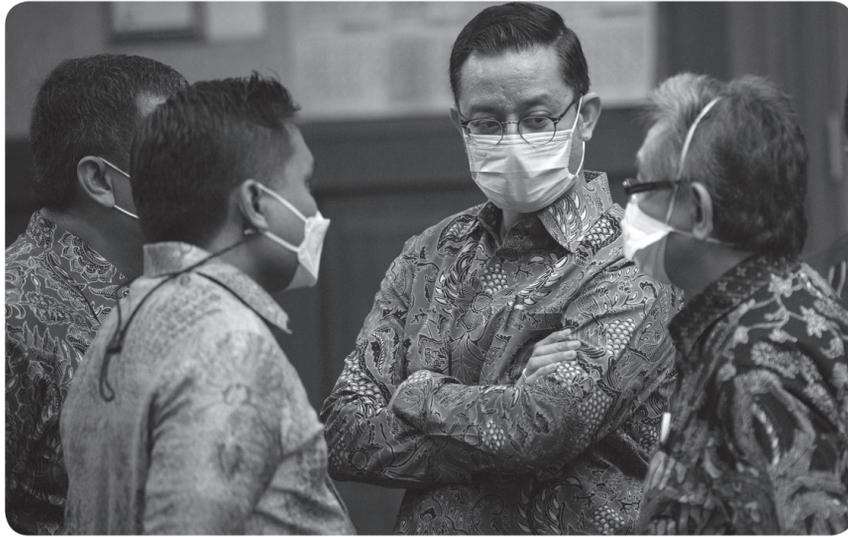
“Beliau ke rumah sakit UMMI,” imbuhnya. Pengadilan Negeri Jakarta Timur kembali menggelar sidang lanjutan Rizieq Shihab dengan agenda pemeriksaan saksi dari Jaksa Penuntut Umum terkait kasus tes usap RS UMMI.

Dalam persidangan kali ini dihadirkan sebanyak enam orang saksi, yaitu dr. Sarbini Abdul Murad (dokter relawan Mer-C), dr. Nerina Mayakartifa (dokter RS UMMI), dr. Faris Nagib (dokter RS UMMI).

Selanjutnya ada dr. Hadiki Habib (Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSCM & Dokter Relawan Mer-C), dr. Nuri Dyah Indrasari, dr. Tonggo Meaty Fransisca (Dokter Relawan Mer-C). ● mei

# 2 Polhukam

IDN/ANTARA



### SIDANG PERDANA MANTAN MENSOS JULIARI BATUBARA

Terdakwa kasus korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 yang juga mantan Menteri Sosial Juliari Batubara (kedua kanan) berdiskusi dengan penasehat hukumnya usai sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Rabu (21/4). Sidang beragendakan pembacaan dakwaan terkait kasus yang juga menyeret dua terdakwa lainnya, mantan pejabat pembuat komitmen di Kementerian Sosial Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.

## Sanksi Denda Maksimal Rp100 Juta bagi Pemudik yang Masih Nekat

Kebijakan pelarangan mudik Lebaran juga harus sejalan dengan penegakan hukumnya. Sebab itu, SE larangan mudik dibuat berbentuk Peraturan menteri.

JAKARTA (IM) - Pemerintah memastikan masyarakat dilarang mudik pada Hari Raya

Idul Fitri atau Lebaran 2021. Larangan itu mulai berlaku 6

hari sebelum Lebaran, yaitu pada Selasa (23/3) lalu.

Sedangkan dasar hukum dari SE itu adalah Undang-Undang (UU) Nomor 18 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sehingga, jika masyarakat yang nekat mudik bisa

diberikan sanksi sesuai dalam Pasal 93 UU No. 6 Tahun 2018 dengan hukuman kurungan paling lama adalah setahun dan denda maksimal hingga Rp 100 juta bila melanggar aturan mudik ini.

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00,” bunyi dari pasal 93.

Pengamat Kebijakan Publik, Agus Pambagio pun menegaskan bahwa kebijakan larangan mudik juga harus sejalan dengan penegakan hukumnya.

“Harus law enforcement, penegakan hukum,” ujar Agus Pambagio dalam keterangannya, Rabu (21/4).

Agus berharap SE itu berbentuk Peraturan Menteri, sehingga bisa digunakan untuk menindak yang melanggar.

“Saya berharap aturan itu bentuknya Peraturan Menteri bukan Surat Edaran. Karena Surat Edaran itu tidak ada aturan hukumnya untuk menindak pelanggaran,” katanya.

“Nah, seharusnya peraturan itu harus dibuat sekarang, karena tidak sulit untuk membuatnya dan juga jangan terlalu banyak kecuali. Kalau itu ada kecuali, kecuali tidak usah diatur saja ya,” ungkapnya.

Agus juga menegaskan

## Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Periksa Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda DKI

JAKARTA (IM) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan Kepala Satuan Pengawas Internal Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Ferra Ferdiant, Rabu (21/4). Ia diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggong, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur pada tahun 2019.

Informasi ini disampaikan Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (21/4). Sebelumnya, KPK telah memeriksa mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Kamis (8/4) lalu.

“Yoory didalami pengetahuan yang bersangkutan antara lain terkait dengan proses pengadaan tanah di wilayah Munjul, Cipayung,” kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (9/4) lalu.

Ali mengatakan, Yoory juga dikonfirmasi terkait adanya dugaan kesepakatan khusus dalam proses negosiasi dengan pihak-pihak yang terkait perkara tersebut. Usai diperiksa, Yoory irit bicara kepada awak media. Ia mengatakan, semua hal yang dibutuhkan KPK telah disampaikan kepada penyidik.

“Sepurat keterangan yang dibutuhkan, berikut dengan datanya semuanya (telah disampaikan ke penyidik), gitu aja ya,” kata Yoory di Gedung Merah Putih KPK.

Yoory enggan menjawab berbagai pertanyaan yang dilontarkan awak media, termasuk soal pernyataan Deputy Penindakan KPK yang menyebut dirinya telah menjadi tersangka.

“Terima kasih ya, permisi,” ucapnya singkat.

Sementara Deputy Penindakan dan Eksekusi KPK

Karyoto mengatakan, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan lahan di Munjul. Ia menyebut, mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya itu sebagai salah satu tersangka dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, KPK juga telah memeriksa Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Bima Priya Santosa pada Selasa (23/3) lalu.

Bima diminta menjelaskan terkait proses awal pengurusan pengadaan dan teknis penganggaran serta pembayaran tanah. Kendati demikian, KPK hingga saat ini belum menyampaikan kasus tersebut secara detail. Sebab, sesuai kebijakan pimpinan KPK, pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau penahanan para tersangka dilakukan. ● mei

## Panglima, Kapolri hingga Menteri Gelar Rakor Kesiapan Hari Raya Idul Fitri

JAKARTA (IM) – Panglima TNI Marsdal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan beberapa menteri menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral kesiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah atau Lebaran 2021.

Rapat tersebut digelar di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (21/4). Agenda itu dilaksanakan secara tertutup.

Selain Panglima, Kapolri dan para menteri, turut hadir pula Kapolda jajaran. Mereka mengikuti Rakor secara virtual.

Dalam Rakor ini beberapa menteri yang hadir antara lain Mendagri Tito Karnavian, Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Kepala BNPB Doni Monardo.

Dalam menghadapi Hari Raya Idul Fitri tahun ini, pemerintah diketahui melancarkan sejumlah kebijakan pelarangan mudik Lebaran lantaran untuk mengendalikan pandemi Covid-19.

Pemerintah melarang ma-

sarakat pergi mudik Lebaran pada periode 6-17 Mei 2021 mendatang. Operator transportasi pun dilarang untuk beroperasi pada masa 6-17 Mei 2021.

Namun, untuk mereka yang memiliki izin khusus melakukan perjalanan diperbolehkan. Asalkan, sesuai dengan aturan yang diatur.

Terkait dengan adanya kebijakan itu, diketahui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri telah menyiapkan 333 titik penyekatan. Hal itu dilakukan untuk mencegah masyarakat yang masih nekat melakukan mudik. ● han



### APEL BERSAMA KORPS PRAJURIT WANITA TNI

Anggota Korps Prajurit Wanita TNI mengikuti apel bersama Korps Prajurit Wanita TNI di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (21/4). Apel dalam rangka memperingati hari Kartini tersebut diikuti 240 peserta yang berasal dari Korps Wanita TNI dan 25 perwakilan PNS wanita dengan tema “Dilandasi Semangat Kesatria dan Profesionalisme Prajurit Wanita TNI Tetap Produktif Di tengah Pandemi COVID-19”.

## KPK Panggil Mantan Dirut Jasindo Terkait Kasus Gratifikasi

JAKARTA (IM) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Mantan Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Solihah, terkait pengusutan kasus jasa konsultasi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil dan Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 s.d Tahun 2012.

Selain memanggil Solihah, tim penyidik juga memanggil tiga saksi lainnya. Mereka yakni, Dody Hendartono seorang wiraswasta, General Manager PT. Prestasi Retail Innovation Adrian Arief Riyadi, dan dua orang swasta Erika Puspitasari serta Refi Tolani.

“Hari ini (21/4) pemeriksaan saksi TPK gratifikasi terkait dengan jasa konsultasi Bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil dan Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Tahun 2008 s.d Tahun 2012, pemeriksaan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Jl Kuningan Persada Kav.4, Setiabudi, Jakarta Selatan,” ujar Plt Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangan-gannya, Rabu (21/4).

Sebelumnya, kata Ali, KPK akan menetapkan tersangka baru terkait pengembangan kasus dugaan korupsi di PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Hal itu, sejalan dengan adanya penyidikan baru terkait kasus korupsi di PT Asuransi Jasindo (Persero).

Namun tersangka baru tersebut akan diumumkan setelah adanya proses penangkapan dan penahanan. Hal itu

bahwa yang terpenting saat ini adalah pelaksanaan implementasinya.

“Jadi, kemudian yang terpenting adalah pelaksanaan implementasinya. Siapa yang akan menjadi komandan ya. Tentu yang jadi komandan itu Kakorlantas. Nah, Kakorlantas itu harus dibekali peraturan juga, bagaimana caranya untuk menindak,” katanya.

Selain itu, Agus mengatakan pemerintah daerah juga bisa menerapkan opsi karantina bagi yang nekat mudik dengan berbayar.

“Kemudian juga pemerintah daerah juga menerapkan karantina yang tidak gratis.

Jadi kalau siapa yang akan memaksa mudik, dia harus karantina berapa hari. Mau seminggu, mau dua minggu silakan. Jadi orang itu malas mudik. Tapi sekali lagi harus ada pengawasan. Sekali lagi, kalau orang tidak bayar ya orang akan tetap jalan. Jadi harus aturan. Nah yang bisa dilakukan adalah karantina bayar sendiri,” paparnya.

Selain ancaman sanksi membayar denda atau hukuman penjara, Agus mengatakan, petugas bisa juga memberlakukan putar balik ataupun denda. Namun, hal ini juga harus dipersiapkan karena pelaksanaannya 24 jam.

“Dua, begitu kena diputar balik kemudian ada denda dan sebagainya. Tapi sekarang, harus diatur siapa yang melaksanakannya. Ini kan 24 jam. Hal-hal ini yang harus dipersiapkan. Jangan orang pindah tempat lalu ada celah mudik,” katanya. ● han

sejalan dengan kebijakan baru pimpinan KPK jilid V.

Ali berjanji KPK tetap akan memberikan informasi secara transparan terkait penyidikan kasus ini. Meski memang, KPK belum akan membuka secara terang siapa tersangka baru dalam kasus ini.

“Informasi secara spesifik terkait perkara ini belum bisa kami sampaikan namun bisa bagaimana amanat UU KPK, perkembangan perkara ini akan selalu kami sampaikan kepada publik secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.

Diketahui, KPK sempat menangani kasus korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) dalam pengadaan asuransi minyak dan gas BP Migas-KKKS pada 2010-2012 dan 2012-2014. Saat itu, KPK menetapkan mantan Dirut Jasindo Budi Tjahjono sebagai tersangka.

Budi telah dinyatakan bersalah karena terbukti merekayasa kegiatan agen dan komisi yang diberikan kepada agen PT Asuransi Jasindo. Hal itu dilakukan Budi sebagai imbalan jasa kegiatan agen atas penutupan asuransi aset dan kontraksi pada BP Migas-KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) tahun 2010-2012 dan 2012-2014.

Budi dijatuhi hukuman tujuh tahun penjara oleh hakim pengadilan tipikor. Sebab, hakim berkeyakinan Budi Tjahjono diperkaya dari perbuatannya tersebut sebesar Rp6 miliar dan 462.795 dolar AS. ● han